

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO TAHUN 2023

Jln. A.H Nasution No 13 Kota Metro

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN ……………………………………………...... 1

1.1 Latar Belakang ……………………………………………...... 1

1.2 Dasar Hukum ……………………………………………...... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……...……………………………………...... 4

1.4 Ruang lingkup ……………………………………………...... 4

1.5 Gambaran hukum ……………………………………………...... 21

BAB II PERENCANAAN KINERJA .……………………………………...... 22

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Penetapan IKU ……………………………………………...... | 22 |
| 2.2 | Tujuan sasaran jangka menengah SKPD …………………… | 22 |
| 2.3 | Strategi dan Kebijakan ……..…………………………………...... | 24 |
| 2.4 | Sasaran dan IKU ……………………………………………...... | 24 |
| 2.5 | IKU ……………………………………………...... | 24 |
| 2.6 | Target dan Capain IKU ……………………………………...... | 25 |
| 2.7 | Program ……………………………………………...... | 25 |

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………...... 26

A. Capaian Kinerja Organisasi ……………………………………... 26

B. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan, Realisasi Belanja berdasarkan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 …… 36

BAB IV PENUTUP ……………………………………………...... 41

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota satu diantara yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagaimana yang tertulis didalam Undang-undang nomor 23 tahun

2014, tentang Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2015, untuk membantu Kepala Daerah menegakkan PERDA dan penyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari pembinaan bidang pemerintahan umum yang diantaranya mencakup upaya untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, tentram, tertib dan teratur.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, SatuanPolisi PamongPraja merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Dalam konteks ini Polisi Pamong Praja juga merupakan aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah, khususnya dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016, Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melelui Sekretaris Daerah yang secara umum bertugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta

menegakkan Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

Sejalan dengan Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur dalam menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah, tersebut, maka di harapkan dapat berperan dalam menjaga dan melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Pemerintah dan Masyarakat Kota Metro.

**1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

PengelolaandanTanggungjawabKeuanganNegara(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

***Satuan Polisi Pamong Pr***T***aj***am***Ko***b***t***ah***M***a***et***n***ro***Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

Tentang Perangkat Daerah

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

Tentang Pedoman Satuan polisi Pamong Praja

14. PeraturanPresiden Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor : 53 Tahun2014 Tentang Petunjuk TehnisPerjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor : 12Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 4

Tahun 2014 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan

angka Kreditnya.

19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro

20. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan

Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**1.3 Maksud danTujuan**

Sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 16

Tahun 2018 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015, bahwa penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka melaksanakan tugas- tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tindakan yustisi/non yustisi untuk penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah bertujuan untuk tercapainya supremasi hukum serta terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum dan tercapainya iklim kondusif pada setiap aktifitas Pemerintah dan Masyarakat .

**1.4 RuangLingkup**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dibentuk berdasarkan Perda Nomor : 12 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Metro dengan penjabaran tugas sebagai berikut :

**1.** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perdadan Peraturan Kepala

Daerah.

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.

e. Pelaksanaan Koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala

Daerah penyelenggaraan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparat lainnya.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

f. Pengawasan terhadap masyarakat,Aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2.** Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisi terhadap warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Menindak warga masyarakat, Aparatur atau Badan Hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

c. Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan

Perlindungan Masyarakat.

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda atau Peraturan Daerah.

e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat Aparatur atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran Perda atau Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Satuan dibantu oleh

1 (Satu) Orang Sekretaris, 4 (empat) Orang Kepala Bidang, 3 (tiga) Orang Kepala Sub Bagian, 12 (dua belas) Kepala Seksi.

- **Sekretaris Mempunyai Tugas:**

a) Melaksanakan Administrasi Umum, Perencanaan Program, Anggaran dan Ketatausahaan.

b) Menyusun rencana langkah-langkah operasional kesekretariatan berdasarkan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif.

c) Mengelola Administrasi Perkantoran.

d) Menyusun/mengoreksi konsep administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar tertib administrasi.

e) Mengkoordinir penyusunan kebutuhan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan dari masing- masing Bidang agar tersedia anggaran yang berbasis kinerja.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

f) Mengkoordinir penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana rumah tangga Satuan Polisi Pamong Praja.

g) Mengelola dan Memberi Pelayanan pembinaan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan tugas dapat berjalan cepat, tepat dan lancar.

h) Mengkoordinir penyusunan laporan, pelaksanaan budaya kerja pengawasan melekat, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Kinerja Keuangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban Pelaksanaan Kinerja.

i) Mengkoordinir penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan Keuangan serta managerial asset.

j) Mengevaluasi laporan bulanan, triwulan operasional kesekretariatan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnnya berdasarkan sumber data yang ada dan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan

k) Mengevaluasi dan monitoring pencapaian target kinerja anggaran dalam lingkup sekretariat Mengkordinasi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing- masing

l) Memimpin pelaksanaan program dan kegiatan urusan kesekretariatan.

m) Mengkoordinir penyusunan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan masukan data dari masing- masing bidang agar tersedia program kerja yang partisipatip.

n) Memberikan penilaian dan evaluasi terhaadap kerja bawahan.

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

- **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas:

a) Penyusunan, Perencanaan, kordinasi pengawasan / monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam lingkup kesekretariatan.

a) Merencanakan dan menyusun rencana kerja dan anggaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

b) Mengkordinasikan perencanaan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kepada bidang dan seksi lain.

c) Menyusun dan mengkordinasikan dokumen prencanaan dan laporan terkait dengan realisasi kinerja, fisik dan keuangan serta managerial asset.

d) Membuat laporan berkala organisasi terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

e) Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap perkembangan dan capaian target-target pelaksanaan program dan Kegiatan.

f) Menyusun perencanaan umum program tahunan, program jangka menengah dan program jangka panjang.

g) Menyiapkan bahan bersama unit kerja terkait dalam

penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD)

h) Menyusun rencana kerja tahunan bersama unit lain yang terkait.

i) Menginventarisasi, mempelajari dan menginput semua data dan informasi terkait dengan penyusunan program dan kegiatan.

j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan. k) Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas :

a) Menyelengarakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan asset-asset kedinasan yang bersifat umum meliputi kendaraan dinas/jabatan peralatan atau perlengkapan kantor dan rumah tangga.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

b) Mengatur pelaksanaan pengelolaan arsip, baik arsip aktif maupun inaktif dan arsip statis agar mudah dan cepat di temukan bila di butuhkan.

c) Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, melaksanakan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas.

d) Menyusun dan mengoreksi konsep daftar urut kepangkatan, Pengusulan Karpeg, Karis/Karsu, Askes, Taspen dan Bapetarum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia data yang valid.

e) Menyusun dan mengoreksi konsep bahan usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala pegawai sesuai dengan periode yang telah di tetapkan agar kenaikan pangkat dan gaji berkala tepat waktu.

f) Mengatur pengumpulan dan pengelolaan data kepegawaian meliputi administrasi sumpah jabatan, pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural, pensiun, cuti pegawai dan sasaran kinerja pegawai untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan.

g) Menyusun dan mengelola daftar hadir pegawai sesuai dengan data absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai.

h) Menyusun dan mengoreksi syarat usulan pelaksanaan diklat struktural dan diklat terkait dengan kepegawaian, keuangan, asset berkordinasi dengan BKD dan Diklat.

i) Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.

j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas:

a. Melaksanakan Program kegiatan keuangan meliputi penyusunan anggaran serta administrasi keuangan meliputi pembayaran, pembukuan dan pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

b. Melaksanakaan verifikasi dan validasi dokumen keuangan berpedoman pada peraturan atau ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan.

c. Pengumpulan bahan dan penyiapan penyusunan anggaran serta pengelolaan administrasi keuangan.

d. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan

Satuan Polisi Pamong Praja.

f. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya.

g. Menyiapkan bahan usulan penetapan bendahara. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

1. **Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam**

**Kebakaran** mempunyai tugas :

a) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

b) Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

c) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan terkait perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

d) Merencanakan dan menyusun bahan pembinaan kelompok swadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

e) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pengkordinasian dengan lembaga lainnya dalam upaya pencegahan penanggulangan akibat bencana.

f) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan koordinasi dengan instansi lainnya untuk melancarkan kegiatan pemilu, pilpres dan pilkada.

g) Merencanakan mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan potensi masyarakat dalam rangka mendukung pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat berbasis

masyarakat.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

h) Merencanakan dan penyusunan pembinaan, pengarahan dan penyiapan pembekalaan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik.

i) Merencanakan dan menyusun konsep inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana operasional Satuan Perlindungan Masyarakat dan Pemadam kebakaran.

j) Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan dan bimbingan tekhnis kepada Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelatihan petugas Pemadam Kebakaran.

k) Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dan Kebakaran.

l) Bidang perlindungan masyarakat di pimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala satuan.

- **Sub Kordinator Fungsional Pelatihan dan Mobilisasi**

**SatLinmas** mempunyai tugas:

a) Menyusun dan merencanakan kerja dan anggaran serta tekhnis dan jadwal kegiatan seksi pelatihan dan mobilisasi Satlinmas berdasarkan rencana yang telah ditetapkan kepala bidang.

b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam rangka bina potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

c) Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pembinaan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pembinaan potensi masyarakat dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

d) Menghimpun data dan informasi hasil koordinasi dengan intansi terkait terhadap potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

e) Mengendalikan cepat tanggap responsif dalam penanganan perlindungan masyarakat dalam lingkup pelaksanaan tugas

kelurahan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

f) Menyelenggarakan pemetaan untuk menemukan kelompok suwadaya masyarakat yang potensial untuk menyelenggarkan perlindungan masyarakat.

g) Mengendalikan dan mengkoordinir sat linmas dalam pelaksanaan kegiatan, membantu upaya pencegahan dan penanggulangan akibat bencana berkoordinasi dan kerjasama dengan lembaga lainya.

h) Mengendalikan dan mengkoordinir Satlinmas dalam pelaksanaan kegiatan membantu pengamanan pemilu, pilpres dan pilkada.

i) Menyelenggarakan pembangunan pisik dan perlengkapan poskamling pada setiap wilayah Rukun Tetangga (RT).

j) Menyelenggarakan pelatihan dan pembekalan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan dan kemandirian untuk mencegah konflik serta pendeteksian konflik.

k) Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana oprasional satuan perlindungan masyarakat.

l) Menyelenggarakan dan mempasilitasi pendidikan, pelatihan dan bimbingan tehnis kepada satuan perlindungan masyarakat.

m) Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Satgas Pencegahan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas:**

a. Menyiapkan bahan dalam perumusan teknis pencegahan bencana kebakaran.

b. Melakukan pendataan dan pemantauan terhadap gedung perkantoran dan rumah masyarakat yang rawan terjadinya bencana kebakaran.

c. Melaksanakan kesiagaan pencegahan bencana kebakaran sebelum dan sesudah terjadi.

d. Mengkoordinasikan pengerahan sumber data pada saat terjadi bencana kebakaran.

e. Mendistribusikan bantuan ketempat sasaran terjadinya

kebakaran.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja kepada kepala bidang sesuai dengan ketentuan .

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Kepala Seksi Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas;

a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran kegiatan seksi sarana dan prasarana berdasarkan rencana yang telah ditetapkan Kepala Bidang.

b. Melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi seksi Sarana dan Prasarana.

c. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dibidang Sarana dan Prasarana.

d. Melaksanakan inventarisasi seluruh peralatan Pemadam

Kebakaran.

e. Melaksanakan pemeliharaan secara kontinyu/ berkala terhadap seluruh peralatan Pemadam Kebakaran .

f. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Sarana dan

Prasarana kepada Kepala Bidang.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

mempunyai tugas **;**

a. Membuat rencana induk penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Merencanakan, mengatur mengawasi pelaksanaan kegiatan pemetaan / mapping terhadap objek atau lokasi sasaran .

c. Menyelenggarakan kegiatan deteksi dini potensi gangguan

ketentraman dan ketertiban umum sebelum dilaksanakan penindakan .

d. Merencanakan,mengatur dan mengawasi peleksanaan pemberian peringatan, teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

e. Melakukan pengendalian masa dalam unjuk rasa.

f. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

g. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengawalan dan pengamanan pejabat.

h. Mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan aset milik

Pemerintah Daerah dan Pengamanan Rumah Dinas Pejabat.

i. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan patroli potensi gangguan ketentraman dan ketertiban

j. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah yang berskala masal berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan kepala satuan.

k. Merencanakan, mengatur dan mengawasi kegiatan deteksi dini dalam rangka deteksi dini potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

l. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan dibidang ketertibaan umum dan ketertiban masyarakat,operasi dan pengendalian serta kerjasama.

m. Bidang Ketertban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

n. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Satuan.

- **Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian** mempunyai tugas:

a) Menyusun dan melaksanakan rencana kerja,anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan kepala bidang.

b) Menyelenggarakan pelaksanaan pemberian peringatan dan teguran pra operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

c) Menyelenggarakan kegiatan oprasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan.

d) Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan intansi terkait untuk kegiatan operasi penertiban, pembongkaran, penutupan dan penyegelan .

e) Mendukung kegiatan operasi penertiban, pembongkaran,

penutupan dan penyegelan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

f) Menyelenggarakan teknis kerjasama dengan intansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah atau kegiatan yang berskala masal.

g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Ketertiban Umum** mempunyai tugas:

a. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan menyelenggarakan kegiatan pemetaan/maping terhadap objek atau lokasi sasaran.

b. Menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban.

c. Mengendalikan patroli ketentraman dan ketertiban yang

dilaksanakan oleh unit pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja kecamatan.

d. Menyelenggarakan pembuatan laporan hasil kegiatan patroli untuk di tindak lanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan oleh bidang terkait.

e. Mengatur dan menyelenggarakan kegiatan patroli ketentraman dan ketertiban dengan melibatkan instansi terkait dalam bentuk tim terpadu.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Pengamanan mempunyai tugas:**

a. Menyelenggarakan Kegiatan Pengawalan dan Pengamanan pejabat daerah,Membantu Pengamanan dan Pengawalan tamu VIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara

b. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan aset milik

Pemerintah Daerah dan Rumah Dinas Pejabat.

c. MelaksanakanPengendalianMassapadaunjukrasa.

d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengamanan kantor dan rumah dinas pejabat.

e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan pengawalan pejabat penting dan tamu daerah.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**3. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah** mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penegakan Perundang- undangan Daerah berdasarkan program kerja yang telah di tetapkan

b. Memimpin dan mengkordinasikan sosialisasi Peraturan

Daerah/Peraturan Daerah yang memuat sangsi.

c. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sangsi secara Pro Yustisi.

d. Fasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah di Kota Metro.

e. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Perda di Kota Metro.

f. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS Penegak Perda Di Kota Metro.

g. Merencanakan ,mengatur dan mengawasi pelaksanaan penindakaan PreventifNon Yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

h. Merencanakan dan mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah.

i. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembinaan penyuluhan dan pengawasan.

j. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. k. Pembinaan Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS).

l. Merencanakan dan merumuskan pemberian sanksi/ penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah serta menyiapkan administrasi penuntutan.

m. Mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan pelaporan.

n. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang- undangan serta kegietan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah.

o. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis operasional lapangan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

p. Pengarahan kepada masyarakat dan Badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.

q. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan

Badan hukum .

r. Pemberdayaan peningkatan kemampuan Personil Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota baik sebagai Penyidik Pegawai Negri sipil (PPNS) maupun pembantu PPNS.

s. Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada Kepala Satuan.

- **Kepala Seksi Penegakan** mempunyai tugas :

a. Memimpin dan mengkordinasikan sosialisasi Peraturan

Daerah yang memuat sangsi.

b. Menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah /Peraturan Kepala Daerah melalui pemberlakuan sangsi secara Pro Yustisi.

c. Fasilitasi administrasi Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Peraturan Daerah.

d. Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Penyidik Pegawai Negri Sipil (PPNS) Penegak Perda.

e. Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Perda / Perkada ( penindakan PreventifNon Yustisia )

f. Melaksanakan penindakan tindak pidana ringan ( Penindakan

Yustisia ).

g. Menyelengarakan penerimaan laporan dari petugas atau warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan Daerah.

h. Menyelenggarakan rapat-rapat dengan PPNS / Korwas PPNS

untuk membuat rekomendasi pemberian sanksi / penindakan

i. hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Perkada.

j. Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti laporan indikasi pelanggaran

Perda/Perkada.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

k. Menyelenggarakan kegiatan preventif Non Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Kepala Daerah.

i. Melaksanakan monitoring,evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS penegak Peraturan Daerah.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan**

Mempunyai tugas:

• Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai dengan rencana kerja yang telah di tetapkan Kepala Bidang.

• Menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan dalam produk hukum daerah.

• Menyusun rencana dan program terkait pembinaan pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat.

• Mnyelenggarakan kegiatan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dan badan hukum yang terindikasi melanggar Peraturan Daerah.

• Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dalam rangka pencegahan pelanggaran Praturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan cara membuat pemberitahuan, melalui selebaran papan pengumuman,spanduk dan media lainnya yang berisi tentang pasal larangan,kewajiban dan sanksi terhadap pelanggar.

• Mengumpulkan produk hukum daerah serta petunjuk teknis lainnya sebagai bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan

• Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum untuk mentaati dan mematuhi Peraturan Daerah.

• Melakukan pendekataan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah.

• Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang- undangan serta kegietan pembinaan dan penyebar luasan

produk hukum daerah.

• Melakukan Pembinaan dan sosialisasi kepada perorangan atau badan hukum/kelompok masyarakat tentang pentingnnya

kesadaran dan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan

Keputusan Kepala Derah.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

• Menyiapkan laporan Seksi Pembinaan Pengawasan dan

Penyuluhan.

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan** mempunyai tugas :

• Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran serta teknis dan jadwal kegiatan Seksi Penylidikan dan Penyidikan produk hukumsesuai dengan rencana kerjayang telah di tetapkan Kepala Bidang.

• Menyelengarakan penerimaan laporan dari petugas atau

• warga masyarakat terkait indikasi pelanggaran Peraturan

Daerah.

• Menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan untuk menindak lanjuti laporan indikasi pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

• Menyelenggarakan kegiatan preventif Non Yustisi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah atau Kepala Daerah.

• Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Polisi Pamong Praja terhadap proses penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan pelaksanaannya.

• Menyiapkan bahan pelaksanaan kordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka tugas penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaanya.

• Menyusun rencana dan program terkait penyidikan dan penyelidikan.

• Menyiapkan surat tugas bagi PPNS dalam rangka penyidikan dan penyelidikan.

• Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi penyelidikan dan penyidikan.

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**4. Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Aparatur mempunyai tugas:**

a. Menyusun rencana kerja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan bidang Sumber daya Aparatur berdasarkan

program kerja yang telah di tetapkan oleh Kepala Satuan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

b. Merencanakan,mengatur dan mengawasi pelaksanaan teknis jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

c. Merencanakan dan menyusun konsep kegiatan pemliharaan dan peningkatan disiplin apartur.

d. Merencanakan, mengatur dan mengawasi penyusunan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait dengan pralatan teknis operasi lapangan.

e. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan kegiatan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik dan non fisik.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- **Kepala Seksi Peningkatan dan Pembinaan Sumber Daya**

**Aparatur** mempunyai tugas:

a) Menyelenggarakan mempersiapkan bahan teknis kordinasi pelaksanaan penilaian angka kredit serta mempersiapkan bahan komulatif dan pengusulan penjenjangan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

b) Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan disiplin aparatur, berkoordinasi dengan atasan langsung personil dan staf yang melakukan pelanggaran disiplin sebelum pengambilan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin pegawai.

c) Pengumpulan dan pengolahan data/ informasi Bidang

Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

d) Menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan diklat personil.

e) Menghimpun dan mengolah data kebutuhan personil dan diklat.

f) Menyelenggarakan diklat dasar, diklat teknis, bimbingan teknis

dan kegiatan peningkatan kemampuan personil baik berupa fisik maupun non fisik berkoordinasi dengan Badan Diklat.

g) Menyelenggarakan teknis Hari Ulang Tahun Satuan Polisi

Pamong Praja.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

h) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

i) Menyusun rencana Upacara Bulanan dan Hari-hari Besar. j) Menyusun rencana pembinaan regu Korsik Satuan Polisi

Pamong Praja.

k) Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi peningkatan pembinaan sember daya manusia.

l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- **Sub Kordinator Fungsional Pelatihan** mempunyai tugas:

• Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong praja melalui pelatihan dasar.

• Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan pembekalan dan kesamaptaan.

• Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan dasar dan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

• Merencanakan kebutuhan dan pelatihan sumber daya aparatur.

• Menyiapkan bahan dan pelaksanaan kegiatan Pengembangan

Sumber Daya Aparatur meliputi pelatihan dasar.

• Menyelenggarakan pelatihan PBB, Kesamaptaan, Dalmas dan

Pemadam Kebakaran.

• Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelatihan.

• Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- **Kepala Seksi Teknis Fungsional** mempunyai tugas:

a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis Fungsional.

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan Teknis Fungsional.

c. Menyusun rencana dan program terkait dengan pelatihan

Fungsional.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

d. Pemberdayaan Pol.PP/PPNS melalui pelatihan-pelatihan

Teknis dan peningkatan kemampuan Pol.PP/PPNS.

e. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan seksi Teknis fungsional.

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

**1.5 Gambaran Umum**

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat penting. Apa yang kita kenal sekarang ini sebagai Satuan Polisi Pamong Praja sebenarnya telah beberapa kali mengalami pergantian nama, yaitu:

a. Berdasarkan Perintah Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 30 Oktober 1948 dari Jabatan Praja Daerah Istimewa Jogjakarta dengan nama Detasemen Polisi Pamong Penjaga Kapanewon dan selanjutnya Perintah Nomor 2 Tahun 1948 tanggal 10 November 1948 diberi nama Detasemen Polisi Pamong Praja, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP/32/2/21 tanggal 3 Maret

1950 yang berlaku 1 Januari 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong

Praja untuk tiap-tiap Kapanewon di Daerah Jogyakarta.

b. Menurut Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah Nomor 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi pamong Praja dirubah menjadi Pagar Baya.

c. Menurut Peraturan Menteri Pemerintah Umum dan Otonom Daerah Nomor 1 Tahun 1963 tanggal 11 Februari 1963 diganti nama menjadi Kesatuan Pagar Praja.

d. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ditetapkan sebutan namanya menjadi Satuan Polisi Pamong Praja.

e. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah dirubahUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kemudian dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor : 23 Tahun2014, ditegaskan bahwa Polisi pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam jajaran Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup strategis, karena tugasnya membantu Kepala Daerah dibidang tugas Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban serta Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Daerah

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

**2.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran yang akan memberikan informasi , untuk mewujudkan sasaran strategis yang sudah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Beberapa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yaitu :

a. Persentase peningkatan ketertiban dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, Keindahan.

b. PersentasePenyelesaianPenegakanPerda.

Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan Pelanggaran

Perda.

c. Persentase Petugas Linmas Kota Metro.

Indikator ini berguna untuk mengetahui tingkat profesionalis medan jumlah anggota Linmas.

d. Jumlah Laporan Kejadian Kebakaran

**2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

A. Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.

Tujuan utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro adalah untuk Penegakkan Peraturan Daerah dan PeraturanKepala Daerah serta upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum dengan maksud:

1. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan di masyarakat yang mendorong untuk tertib hukum, tertib sosial serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakn pembangunan.

2. TerwujudnyaPolisiPamongPrajadanPenyidikPegawaiNegeri Sipil

(PPNS) yang profesional dan handal dalam pelaksanaan tugas.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

3. Terwujudnya pengamanan di Rumah Dinas Pejabat , Kantor milik

Pemerintah, bangunan vital milik Pemerintah Daerah serta tempat umum guna menunjang pelaksana tugas-tugas Pimpinan Daerah

4. Terwujudnya sistem kolaborasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan Aparat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

5. Terlindunginyamasyarakatdaribahayakebakaran.

B. Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja.

Sasaran utama yang ingin dicapai adalah berkurangnya pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah serta menurunnya gangguan ketentraman serta terciptanya rasa aman di masyarakat.

Adapun sasaran yang ingin dicapai untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya konflik sosial yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.

2. Berkurangnya pelanggaran dan penindakan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan Kepala Daerah.

3. Berkurangnya aksi unjuk rasa yang mengarah ketindakan anarkis.

4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan

Daerah.

5. Terkendalinya ketentraman, keamanan dari bencana kebakaran, ketertiban dan keindahan kota.

Agar aktivitas yang akan dilakukan memiliki landasan dan Iingkup pencapaian yang jelas, maka sebelumnya perlu ditetapkan secara jelas kebijakan dan program kerja.

Seluruh penentuan kebijakan, program kerja dan aktivitas yang jelas merupakan strategi yang sangat menentukan bagi keberhasilan suatu organisasi, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro .

**2.3 Strategi dan Kebijakan**

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**a. Strategi.**

- SosialisasiPerdadanPerundang-undangan;

- PengamananpelaksanaanGoodGovernance.

- KerjasamadenganaparatpenegakhukumdanMasyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan;

- Sosialisasi tentang pentingnya menjaga lingkungan dan penanganan dini bahaya kebakaran

**b. Kebijakan**

Kebijakan merupakan landasan bagi pelaksanaan aktivitas organisasi agar pelaksanaan aktivitas yang diselenggarakan dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sejalan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro menetapkan kebijakan untuk tahun 2016-2021 yaitu:

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kualitas SDM Aparatur.

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

**2.4 Sasaran dan IKU**

1. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Masyarakat.

2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perwali

Kota Metro

3. Rasio Petugas Linmas Kota MetroTerhadap Rukun Tetangga

4. Meningkatnya Rasa Aman Mayarakat dari Bahaya Kebakaran

**2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).**

1) Persentase Tingkat Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2) Persentase Penyelesaian Penegakan Perda

3) Rasio Petugas Linmas Kota Metro

4) Jumlah Laporan Kebakaran Masyarakat

**2.6 Target Capaian IKU**

***Satuan Polisi Pamong*** 1***P***)***raj***P***a*** e***K***r***o***s***ta***e***M***nt***e***a***tr***s***o***e Tingkat Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan Pada

Tahun 2022 Mempunyai Target Capaian 85 % sedangkan Capaian

IKU 85%

2) Persentase Penyelesaian Perda Pada Tahun 2022 Mempunyai

Target 55% sedangkan Capaian IKU 60%

3) Rasio Petugas Linmas Kota Metro mempunyai Target Capaian 1:2

Sedangkan Capaian IKU 1:2

4) Jumlah Laporan Kejadian Kebakaran di Kota Metro Sebanyak 92

Kejadian,yang dapat di tindak lanjuti sebanyak 92 Kejadian

**2.7 Program**

a. Program Penunjang pemerintahan Daerah Kab/Kota

b. Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran** | **IndikatorKinerja**  **(OutCome)** | **Satuan** | | **Target** |
| **Misi 4 (RPJPMD Kota Metro Tahun 2021-2026) Mewujudkan**  **Pemerintah Kota Metro yang Good Governance melalui Peningkatan**  **Kuwalitas Pelayanan Publik** | | | | | |
|
|
| 1 | Peningkatan Ketertiban | Persentase Peningkatan | | **%** | **85** |
| dan Kenyamanan | Ketertibandan Kenyamanan | |
| Lingkungan Masyarakat | Lingkungan.Masyarakat | |
| 2 | Penyelesaian Penegakan | Pesentase Penyelesaian | | **%** | **60** |
| Perda | PenegakanPerda | |
| 3 | RasioPetugas | Rasio Petugas | | **Rasio** | **1:2** |
| LinmasdiKota Metro | LinmasdiKotaMetro | |
| 4 | Laporan Kejadian | LaporanMasyarakat yang | | **%** | **100** |
| Kebakaran | dapatdi tindak lanjuti | |

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja mencakup Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing kelompok indikator kinerja, dan tingkat pencapaian sasaran instansi yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing – masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dimaksud dapat dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase

pencapaian

realisasi rencana =

tingkat capaian

Realisasi–(Realisasi- rencana)

Rencana

x 100%

Kriteria Capaian hasil Pengukuran Kinerja dengan klarifikasi/rentang dapat terlihat dalam table A.1 sebagai berikut :

tabel A.1

- 85 %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | RENTANG CAPAIAN | | | | KATEGORI CAPAIAN |
| 1. | 85 % |  | - | > 100 % | Sangat Berhasil |
| 2. | 70 % |  |  | | Berhasil |
| 3. | 55 % |  |  | | Cukup Berhasil |
| 4. | < 55 % |  |  |  | Tidak Berhasil |

- 70 %

Adapun cara pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Metro tersaji dalam tabel di bawah :

Tabel A.2

Pengukuran Indikator Kinerja Utama

***Satuan Polisi Pamong Praja*** S***K***a***ot***t***a***ua***M***n***etr***P***o***olisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2022

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator Kinerja Utama** | **Formulasi** |
| 1 | Persentase Peningkatan  Ketertiban dan Kenyamanan lingkungan masyarakat | jumlah gangguan ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang dapat  ditanggulangi dibagi gangguan ketertiban dan keamanan yang terjadi  dikali 100 . |
| 2 | Persentase penyelesaian  penegakan Perda | Jumlah penyelesaian penegakan  Perda dibagi jumlah pelanggaran  Perda dikali 100 |
| 3 | Jumlah laporan kebakaran | Jumlah laporan masyarakat dibagi jumlah laporan yang ditindaklanjuti  dikali 100 |

**1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA**

Hasil Pengukuran Kinerja berdasarkan data kuantitatif antara Target dan Realisasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro Tahun 2022 dapat terlihat dalam table A.3 berikut ini:

Tabel A.3

Target dan Realisasi Kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **Capaian** | **Keterangan** |
| **2022** | **2022** | **2022** |
| 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan | Persentase peningkatan | 100 | 96 | 96 |  |
| ketertiban dan |  |
| kenyamanan lingkungan |  |
| masyarakat |  |
| 2 | Meningkatnya kesadaran | Persentase penegakan | 100 | 99 | 99 |  |
| masyarakat terhadap | peraturan daerah dan |  |
| peraturan Daerah dan  peraturan Walikota Metro | peraturan Walikota Metro |  |
|  |  | Terlaksananya pelatihan | - | - | - | kegiatan tidak |
|  |  | dasar bagi anggota Satpol | dilaksanakan |
|  |  | PP Kota Metro | dikarenakan tidak |
|  |  |  | ada anggaran |
| 3 | Meningkatnya rasa aman masyarakat Kota Metro dari bahaya kebakaran | Persentase terlaksananya | 100 | 97 | 97 |  |
| situasi yang aman bagi  masyarakat dari bahaya kebakaran |  |
| 4 | Tercukupinya penunjang | Persentase cakupan | 100 | 97,4 | 97,4 |  |
| urusan pemerintah | pelayanan administrasi |  |
| daerah kab/kota | perangkat daerah |  |
| 5 | Meningkatnya | Persentase capaian | 100 | 96 | 96 |  |
| ketentraman dan | peningkatan ketentraman |  |
| ketertiban umum | dan ketertiban umum |  |
| 6 | Terlaksananya | Persentase pencegahan, | 100 | 97 | 97 |  |
| pencegahan, | penanggulangan, |  |
| penanggulangan, | penyelamatan kebakaran |  |
| penyelamatan kebakaran | dan non kebakaran |  |
| dan non kebakaran |  |  |

Capaian kinerja diatas diukur melalui indikator kinerja dari sasaran ***Satuan Polisi Pamo***p***n***r***g***og***P***ra***j***m***a Ko***y***t***a***a***n***M***g***etr***d***o***iperjanjikan kinerjanya yang ditujukan pada peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penegakan perda,

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 59,06% pada tahun 2021 mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 63,81%

**2. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN**

**2021-2026**

Kemudian untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang berikutnya adalah melakukan pengukuran antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 -

2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel A.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi Kinerja** | | | | | | **Capaian Kinerja** | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan | Persentase peningkatan | 85 | 96 |  |  |  |  | 85 | 96 |  |  |  |  |
| ketertiban dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kenyamanan lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| masyarakat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya kesadaran | Persentase penegakan | 65 | 99 |  |  |  |  | 65 | 99 |  |  |  |  |
| masyarakat terhadap | peraturan daerah dan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| peraturan Daerah dan  peraturan Walikota Metro | peraturan Walikota Metro |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terlaksananya pelatihan | - | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  | dasar bagi anggota Satpol  PP Kota Metro |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Meningkatnya rasa aman masyarakat Kota Metro dari bahaya kebakaran | Persentase terlaksananya | 100 | 97 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |  |
| situasi yang aman bagi  masyarakat dari bahaya kebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tercukupinya penunjang | Persentase cakupan | 85 | 97,4 |  |  |  |  | 85 | 97,4 |  |  |  |  |
| urusan pemerintah | pelayanan administrasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| daerah kab/kota | perangkat daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Meningkatnya | Persentase capaian | 85 | 96 |  |  |  |  | 85 | 96 |  |  |  |  |
| ketentraman dan | peningkatan ketentraman |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ketertiban umum | dan ketertiban umum |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Terlaksananya | Persentase pencegahan, | 100 | 97 |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |  |  |
| pencegahan, | penanggulangan, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| penanggulangan, | penyelamatan kebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| penyelamatan kebakaran | dan non kebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dan non kebakaran |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Satuan Polisi Pamo***P***n***e***g***n***P***g***r***u***aj***k***a***u***K***r***o***a***t***n***a Metr***k***o***inerja dari tahun 2021 – 2026 menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun

perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

a. Indikator kinerja 1 : Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya

b) Sasaran strategis : Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap

Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Metro

a. Indikator kinerja 2 : Tingkat penyelesaian pelanggaran Peraturan

Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

b. indikator kinerja 3 : Tingkat pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Kemudian tahun 2022 juga tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak ada.

c. Sasaran Strategis : presentase tingkat waktu tanggap mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.

Indikator kinerja 4 : Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran Mengalami perubahan dalam realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena sudah mengalami penurunan karena data kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

d. Sasaran strategis : Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah Indikator kinerja 5 : Persentase Cakupan pelayanan administrasi realisasi kinerja di tahun 2022 belum mengalami kenaikan. Hal ini disebabkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP guna menunjang pelayanan ke masyarakat

e. Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Indikator kinerja 1 : Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya

f. presentase tingkat waktu tanggap mengalami kenaikan dibandingkan

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

dengan sebelumnya.

Indikator kinerja 4 : Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time

Rate) kejadian kebakaran Mengalami perubahan dalam realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena sudah mengalami penurunan karena data kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra.**

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel A.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi Kinerja** | | | | | |
|  |  | **2022** | | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan | Persentase peningkatan | 85 | 85 | 96 |  |  |  |  |
| ketertiban dan |  |  |  |  |
| kenyamanan lingkungan |  |  |  |  |
| masyarakat |  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya kesadaran | Persentase penegakan | 60 | 65 | 99 |  |  |  |  |
| masyarakat terhadap | peraturan daerah dan |  |  |  |  |
| peraturan Daerah dan  peraturan Walikota Metro | peraturan Walikota Metro |  |  |  |  |
|  |  | Terlaksananya pelatihan - dasar bagi anggota Satpol  PP Kota Metro | | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3 | Meningkatnya rasa aman masyarakat Kota Metro dari bahaya kebakaran | Persentase terlaksananya | 100 | 100 | 97 |  |  |  |  |
| situasi yang aman bagi  masyarakat dari bahaya kebakaran |  |  |  |  |
| 4 | Tercukupinya penunjang | Persentase cakupan | 100 | 85 | 97,4 |  |  |  |  |
| urusan pemerintah | pelayanan administrasi |  |  |  |  |
| daerah kab/kota | perangkat daerah |  |  |  |  |
| 5 | Meningkatnya | Persentase capaian | 100 | 85 | 96 |  |  |  |  |
| ketentraman dan | peningkatan ketentraman |  |  |  |  |
| ketertiban umum | dan ketertiban umum |  |  |  |  |
| 6 | Terlaksananya | Persentase pencegahan, | 100 | 100 | 97 |  |  |  |  |
| pencegahan, | penanggulangan, |  |  |  |  |
| penanggulangan, | penyelamatan kebakaran |  |  |  |  |
| penyelamatan kebakaran | dan non kebakaran |  |  |  |  |
| dan non kebakaran |  |  |  |  |  |

**4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal**

***Satuan Polisi Pamo*(S*ng*P*P*M*ra*)*ja*/ *K*S*o*t*t*a*a*n*M*d*e*a*tr*r*o* Nasional lainnya.**

Tabel A.6

peraturan Walikota Metro

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Realisasi** | **Standar Nasional** | |
| **Kinerja** | **Target** | **Realisasi** |
| **2022** | **2022** | **2022** |
| 1 | Meningkatnya rasa aman dan nyaman dalam lingkungan | Persentase peningkatan | 99,78 | 85 | 99,78% |
| ketertiban dan kenyamanan  lingkungan masyarakat |
| 2 | Meningkatnya kesadaran | Persentase penegakan | 98,89 | 60 | 98,89% |
| masyarakat terhadap | peraturan daerah dan |
| peraturan Daerah dan | peraturan Walikota Metro |
|  |  | Terlaksananya pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP Kota Metro | - | - | - |
| 3 | Meningkatnya rasa aman masyarakat Kota Metro dari bahaya kebakaran | Persentase terlaksananya | 99,17 | 100 | 9917% |
| situasi yang aman bagi  masyarakat dari bahaya kebakaran |
| 4 | Tercukupinya penunjang | Persentase cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah | 97,4 | 100 | 97,40% |
| urusan pemerintah |
| daerah kab/kota |
| 5 | Meningkatnya | Persentase capaian | 99,78 | 100 | 99,78% |
| ketentraman dan | peningkatan ketentraman dan |
| ketertiban umum | ketertiban umum |

**5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN**

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya. Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

. Indikator kinerja 1 : Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan

ketentraman dan ketertiban umum Mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya walaupun masih ada kendala internal maupun external yang bias menyebabkan penurunan pencapaian kinerja dikarenakan kenaikan target untuk setiap tahunnya. Akan tetapi untuk tahun 2022 mengalami kenaikan capaian kinerja dibanding tahun

2021.

Kondisi social ekonomi dan Politik dalam Pandemi Covid-19 di Kota Metro relative masih terkendali halini ditandai tidak adanya konflik yang terjadi dimasyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan.

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

Demo/unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, mahasiswa

dan LSM ditujukan ke Pemerintah Kota Metro dan Dinas Instansi

yang lain Tahun 2019 jumlah 2 Kali unjuk rasa.

Unjuk rasa dapat dikendalikan karena adanya kerjasama antara

Polisi PamongPraja dengan Polres Metro

Operasi ketertiban dan keamanan dilaksanakan, Dalam rangka menekan Covid 19 berupa oprasi non Yustisi dan Yustisi

Pengamanan hari-hari besar keagamaan dan Pergantian Tahun di

Tiadakan di karenakan masih adanya wabah Covid-19.

Fasilitasi dan koordinasi penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu saling koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Polres Metro dalam menanggulangi berbagai tindakan yang melibatkan masyarakat banyak, salah satu contoh dalam rangka oprasi yustisi dan non yustisi Penegakan Protokol Kesehatan dapat dilaksanakan.

Dengan dilaksanakan operasi ketertiban dan keamanan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Metro.

b. Sasaran strategis : presentase tingkat waktu tanggap mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya (rata-rata capaian indikator sekitar 99%)

- Indikator kinerja 2 : Tingkat penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun sarana dan prasarana yang terbatas yang dimiliki oleh Satpol PP guna menunjang pelayanan dimasyarakat.

- indikator kinerja 3 : Tingkat pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota Satpol PP tidak bisa dilaksanakan di tahun 2021 dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Kemudian tahun 2022 juga tidak dilaksanakan dikarenakan anggaran tidak ada, sehingga tingkat capaian kinerja juga mengalami penurunan realisasi kinerja ditahun 2022 sehingga belum memenuhi target. Meskipun sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro terbatas namun Satpol PP tetap berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan melindungi masyarakat melalui pembinaan terhadap anggota linmas yang ada dikota metro agar lebih maksimal untuk pencapaian realisasi kinerja.

c. Sasaran Strategis : presentase tingkat waktu tanggap mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.

a. Indikator kinerja 4 : Persentase tingkat waktu tanggap (Response ***Satuan Polisi Pamong Praja K***T***ot***i***a***m***M***e***etr***R***o*** ate) kejadian kebakaran Mengalami perubahan dalam realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sudah

mengalami penurunan karena data kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

d. Sasaran strategis : Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah a. Indikator kinerja 5 : Persentase Cakupan pelayanan administrasi

realisasi kinerja di tahun 2022 untuk realisasi kinerja mengalami kenaikan. Namun target untuk 2021 dan 2022 terlampau tinggi dan juga terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP guna menunjang pelayanan ke masyarakat

e. Sasaran Strategis : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

a. Indikator kinerja 6 : Tingkat penyelesaian pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum Mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya

f. Sasaran Strategis : presentase tingkat waktu tanggap mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.

a. Indikator kinerja 7 : Persentase tingkat waktu tanggap (Response

Time Rate) kejadian kebakaran Mengalami perubahan dalam realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya karena sudah mengalami penurunan karena data kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022

**6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Nilai potensi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditargetkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai target sasaran strategis adalah Sumber Daya Manusia (anggota Satpol PP) dan Anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022 untuk melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis.

g. Sumber Daya Manusia, yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sangatlah minim sekali dibandingkan wilayah tugas dan kompleksitas ketertiban umum, dalam kajian Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi serta dalam pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SATUAN POLISI

***Satuan Polisi Pamong***P***P***A***ra***M***ja***O***K***N***ot***G***a M***P***et***R***ro***AJA KOTA METRO TAHUN 2022 masih belum memadai.

Pengaturan dan Penetapan Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja telah

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun

2012 Tentang Pedoman Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja, dengan hasil Kajian dan analisa Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro. Guna optimalisasi pendayagunaan Sumberdaya Manusia maka Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun 2022 telah melakukan rekruitmen Tenaga Bantu Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak + 135 personil, yang diperbantukan dalam pelaksanaan Tugas anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

h. Untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri membutuhkan biaya cukup besar yang harus ditanggung oleh APBD Kota Metro, tahun 2022 dikarenakan tidak efektifnya pelaksanaan kegiatan, karena pada pencapaian output kegiatan sudah 100%, akan tetapi karena ada beberapa kebijakan yang tidak bisa mencapai kinerja indikator sasaran.

Pada indikator Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk, untuk meningkatkan kinerja Satpol PP dibutuhkan anggota polisi pamong praja yang memadai, akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada pengangkatan Pengawai Negeri Sipil untuk formasi Polisi Pamong Praja yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Sehingga penggunaan Sumber Daya sudah efisien dalam pencapaian kinerja sasaran strategis.

**7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

**pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Pengukuran Capaian Kinerja organisasi berikutnya adalah menganalisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja pada Sasaran Renstra Satpol PP yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Capaian kinerja untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja Tahun

2022 Satpol PP Kota Metro sudah berhasil dicapai hampir 100% sebagaimana pada tabel A.5 di atas. Masih ada indikator kinerja yang belum berhasil dicapai

yaitu petugas linmas untuk setiap RT sebanyak 1 orang. Karena ketiadaan anggaran maka kegiatan tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu untuk tahun kedepannya perlu ditingkatkan perencanaan

kegiatan untuk pembinaan petugas linmas yang sudah ada dan

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

peningkatan peran serta masyarakat untuk menjadi petugas linmas.

Namun untuk Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada

perjanjian kinerja tahun 2022 dilakukan melalui program/kegiatan sebagaimana pada tabel A.7 di bawah :

Tabel A.7

Keberhasilan/kegagalan pencapaian Perjanjian kinerja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Capaian** | **Program** | **sangant** | **Berhasil** | **Cukup** | **Tidak** |
| **2021** | **berhasil** | **Berhasil** | **Berhasil** |
| Meningkatnya | Cakupan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  100% | 87% | Program peningkatan |  | **√** |  |  |
| penanganan | ketentraman dan |  |  |  |
| pelanggaran dengan | ketertiban umum |  |  |  |
| tindakan yang cepat | Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak |  |  |  | **√** |  |  |
| Meningkatnya | Persentase terlaksananya | 100% | Program Penunjang | **√** |  |  |  |
| kualitas pelayanan | Administrasi di Satpol PP | Urusan Pemerintahan |  |  |  |
| ketertiban umum |  | Daerah Kab/Kota |  |  |  |
| dan ketentraman |  |  |  |  |  |
| Meningkatnya | Persentase pencegahan, | 90% | Program Pencegahan, |  | **√** |  |  |
| penanganan | penanggulangan, | penanggulangan, |  |  |  |
| kebakaran dan non | penyelamatan kebakaran dan | penyelamatan kebakaran |  |  |  |
| kebakaran | non kebakaran | dan penyelamatan non  kebakaran |  |  |  |

2. Capaian kinerja untuk mencapai target indikator kinerja pada sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro 2022 dapat berhasil dicapai walaupun belum 100% dari target kinerja yang dilakukan melalui program/kegiatan. Keberhasilan pencapaian target kinerja dilakukan melalui program/kegiatan sebagamana berikut : **Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan ketertiban umum dan**

**ketentraman umum.**

**Indikator 1 :**

Cakupan penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan target 90% telah berhasil tercapai dengan baik Indikator ini dapat terlaksana melalui Program

Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman umum

**Indikator 2 :**

Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak, dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 93%. Indikator ini dapat terlaksana melalui :

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum **Sasaran 2 : kualitas pelayanan ketentraman dan ketertiban umum** Prosentase pelanggaran Perda yang ditindak, dengan target 100%

***Satuan Polisi Pamong P***te***ra***l***j***a***a***h***Kot***s***a***a***M***n***e***g***tr***a***o***t berhasil tercapai sebesar 94%. Indikator ini dapat terlakanan melalui program :

Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum. **Sasaran 3 : Meningkatnya penanganan kebakaran dan non kebakaran**

Persentase tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) kejadian kebakaran Mengalami perubahan dalam realisasi kinerja dibandingkan tahun sebelumnya sudah mengalami penurunan karena data kejadian kebakaran yang terjadi selama tahun 2021 lebih sedikit dibandingkan tahun 2022.

**B. Realisasi Anggaran Program/Kegiatan, Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :**

**Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022**

**i. PENDAPATAN Rp. 5.691.000,-**

Rp.5.350.000,- pRp.5.350.000,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **ANGGARAN** | **REALISASI (Rp)** |
| **(Rp)** |
| 1 | Retribusi Pemeriksaan |  |  |
| Alat Pemadam |
| Kebakaran |

**ii. BELANJA Rp. 8.293.928.653,-**

**1. BELANJA OPERASI Rp. 8.293.928.653,-**

Realisasi Belanja Pegawai masuk dalam belanja operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.8.663.940.064,- dengan rincian sebagai berikut:

**a. GAJI DAN TUNJANGAN**

***n Polisi Pa***B***m***e***on***rd***g***a***P***s***r*** a***ja***rk***K***a***o***n***ta***K***M***o***e***n***tr***d***o***isi Kerja

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **NO** | **URAIAN** | | **ANGGARAN** | **REALISASI** |
| 1 | Gaji Pokok PNS/Uang  Representasi | | 4.792.112.646 | 4.762.377.587 |
| 2 | Tunjangan Keluarga ASN | | 559.855.182 | 534.415.793 |
| 3 | Tunjangan jabatan ASN | | 217.280.000 | 187.540.000 |
| 4 | Tunjangan Fungsional ASN | | 546.345.000 | 532.410.000 |
| 5 | Tunjangan Umum ASN | | 49.810.000 | 36.950.000 |
| 6 | Tunjangan Beras | | 349.182.060 | 335.666.700 |
| 7 | Tunjangan Khusus ASN | | 4.867.540 | 3.907.553 |
| 8 | Pembulatan Gaji | | 165.476 | 59.626 |
| 9 | Tambahan Penghasilan  Berdasarkan Beban Kerja | | 932.529.000 | 921.484.841 |
| 10 | Tambahan Penghasilan | | 107.826.658 | 101.335.908 |
| ***Satua*** |  |  |  |
|  |  |  | 24.883.443 | 22.251.298 |
|  | 11 | Tambahan Penghasilan  Berdasarkan Kelangkaan | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Tambahan Penghasilan  Berdasarkan Prestasi Kerja | 709.121.648 | 702.881.150 |
|  | **JUMLAH** | **8.294.498.653** | **8.141.280.456** |

**b. HONORARIUM PNS**

Realisasi belanja honorarium PNS masuk dalam Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.50.865.000,- dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Honorarium PNS** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** |
| 01 | Honorarium Penanggung jawab  pengelola keuangan | 42.705.000 | 42.705.000 |
| 02 | Honorarium pengadaan barang dan  jasa | 8.160.000 | 8.160.000 |
|  | **JUMLAH** | **50.865.000** | **50.865.000** |

**2. BELANJA BARANG DAN JASA Rp. 6.294.709.000,-**

**a) BELANJA BAHAN PAKAI HABIS**

Realisasi belanja bahan pakai habis masuk dalam Kelompok

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.

347.775.226,- dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Bahan Pakai Habis** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** |
| 01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 174.322.300 | 160.207.226 |
| 03 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik | 11.679.800 | 11.679.800 |
| 04 | Belanja Benda Pos | 10.430.000 | 10.130.000 |
| 05 | Belanja Penambah Daya Tahan  Tubuh | 37.014.600 | 36.987.700 |
| 08 | Belanja Pengisian Tabung Gas | 680.000 | 680.000 |
| 09 | Belanja Kertas dan Cover | 8.731.100 | 8.731.100 |
| 10 | Belanja Kegiatan Kantor Lainnya | 102.700.000 | 101.919.000 |
| 11 | Belanja Bahan Lainnya | 9.423.400 | 9.423.400 |
| 12 | Belanja Bahan Baku | 8.017.000 | 8.017.000 |
|  | **JUMLAH** | **362.998.200** | **347.775.226** |

**b) BELANJA JASA KANTOR**

Realisasi belanja jasa kantor masuk dalam Kelompok Belanja

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.**

**6.542.075.252,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Jasa Kantor** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 01 | Belanja Jasa Lembur | 56.347.000 | 56.312.000 |
| 02 | Belanja Jasa | 47.100.000 | 41.500.000 |
|  | Narasumber/Moderator/Pembawa  Acara/Dirjen/Pembaca Doa/ |  |  |
| 03 | Belanja Jasa Tenaga  Ketetraman,Ketertiban Umum, dan | 3.399.800.000 | 3.174.734.130 |
|  | Perlindungan Masyarakat. |  |  |
| 04 | Belanja Jasa Tenaga Administratif | 3.158.600.000 | 3.158.600.000 |

05 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 22.800.000 22.500.000

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 06 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 33.000.000 | 32.400.000 |
| 07 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 3.000.000 | 3.000.000 |

08 2.488.000

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Belanja Langganan Jurnal/Surat  Kabar/Majalah | 2.500.000 |  |
| 09 | Belanja Tagihan Telpon | 6.312.000 | 888.624 |
| 10 | Belanja Tagihan Listrik | 29.511.929 | 29.174.498 |
| 11 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan  Perizinan | 3.150.000 | 2.549.000 |
| 12 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan  Pemotretan | 904.000 | 704.000 |
| 13 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan  Sekertariat, Tim Pelaksana Kegiatan | 18.775.000 | 16.625.000 |
| 14 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 600.000 | 600.000 |
|  | **JUMLAH** | **6.782.399.929** | **6.542.075.252** |

**c) BELANJA PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR**

Realisasi belanja perawatan kendaraan bermotor masuk dalam

Kelompok Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 260.956.000,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Perawatan**  **Kendaraan Bermotor** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 01 | Belanja Bahan Bakar dan  Pelumas | 212.535.950 | 212.398.000 |
| 02 | Belanja Suku Cadang Alat  Angkutan | 34.856.000 | 34.572.000 |
| 03 | Belanja Suku Cadang Alat  Bengkel | 14.028.000 | 13.986.000 |
|  | **JUMLAH** | **261.419.950** | **260.956.000** |

**d) BELANJA CETAK DAN PENGGANDAAN**

Realisasi belanja cetak dan penggandaanmasuk dalam

Kelompok Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.85.604.200,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **Belanja Cetak dan**  **Penggandaan** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 01 | Belanja Cetak | 45.954.800 | 45.886.800 |

**e) BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN**

Realisasi belanja makanan dan minuman masuk dalam

Kelompok Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 43.984.000,-** dengan rincian sebagi berikut :

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N0** | **Belanja Makanan dan**  **Minuman** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 01 | Belanja Makanan dan Minuman  Rapat | 15.946.000 | 15.500.000 |
| 02 | Belanja Makanan dan Minuman  Aktivitas Lapangan | 29.020.000 | 28.484.000 |
|  | **JUMLAH** | **44.966.000** | **43.984.000** |

**f) BELANJA PAKAIAN DINAS**

Realisasi pakaian dinas dan atributnya masuk dalam Kelompok

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.**

**142.538.000,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Pakaian Dinas dan**  **Atributnya** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 01 | Belanja Pakaian Dinas Lapangan  (PDL) | 146.080.000 | 142.538.000 |
|  | **JUMLAH** | **146.080.000** | **142.538.000** |

**g) BELANJA PEMELIHARAAN**

Realisasi belanja pemeliharaan masuk dalam Kelompok Belanja

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp.**

**369.110.700,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Pemeliharaan** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 01 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 9.680.000 | 9.520.000 |
| 02 | Belanja Pemeliharaan Peralatan  dan mesin | 183.090.000 | 179.795.350 |
| 03 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor  lainnya | 2.440.000 | 2.440.000 |
| 04 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor  alat pendingin | 5.700.000 | 5.700.000 |
| 05 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan  Bermotor | 170.000.000 | 166.705.350 |
| 06 | Belanja Pemeliharaan Alat Personal  Komputer | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 07 | Belanja Pemeliharaan Alat  Komputer Lainnya | 2.760.000 | 2.760.000 |
|  | **JUMLAH** | **375.860.000** | **369.110.700** |

**3. BELANJA MODAL Rp. 38.111.000,-**

**a) BELANJA MODAL PENGADAAN PERALATAN KANTOR** Realisasi belanja modal pengadaan peralatan kantor masuk dalam Kelompok Belanja Modal Tahun Anggaran 2022

sebesar **Rp.7.691.000,-** dengan rincian sebagi berikut :

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Modal Pengadaan**  **Peralatan Kantor** | **Anggaran (Rp)** | **Realisasi (Rp)** |
| 01 | Belanja Modal Pengadaan Alat  Dapur | 942.000 | 940.000 |
| 02 | Belanja Modal Pengadaan  Mebel | 6.751.000 | 6.751.000 |
|  | **JUMLAH** | **7.693.000** | **7.691.000** |

**b) BELANJA MODAL PENGADAAN KOMPUTER**

Realisasi belanja modal pengadaan komputer masuk dalam

Kelompok Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar

**Rp26.100.000,-** dengan rincian sebagi berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Belanja Modal Pengadaan Komputer** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** |
| 01 | Belanja Modal Pengadaan Komputer /PC | 17.218.000 | 16.100.000 |
| 02 | Belanja Modal Pengadaan Peralatan  Komputer Lainnya | 13.200.000 | 10.000.000 |
|  | **JUMLAH** | **30.418.000** | **26.100.000** |

***Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro***

**BAB IV**

**A. KESIMPULAN**

**PENUTUP**

1. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal sebagai instansi yang memberikan pelayanan dalam rangka ketentraman dan ketertiban kepada masyarakat Kota Metro.

2. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro pada tahun 2022 telah sesuai dengan rencana Kerja (Renja) yang disusun pada awal tahun 2022, serta ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) dari Eselon II hingga staf dan juga rencana aksi Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022.

3. Dengan melaksanakan rencana aksi maka hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro telah mencapai target yang ditetapkan.

**B. PENUTUP**

Demikian laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro disusun sebagai wujud pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2022. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pencapaian kinerja organisasi sebagai bahan evaluasi pimpinan dalam mengambil kebijakan serta pembinaan terhadap ASN di Kota Metro agar nantinya dapat meningkatkan kualitas kinerja sebagai instansi pelayanan publik, khususnya dalam mendukung tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) demi mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Terhormat dan Bermartabat menuju Visi Kota Metro 2021-2026 yaitu “**Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera dan Berbudaya”**

Kami menyadari bahwa dalam penyajian laporan kinerja ini masih banyak kekurangan oleh sebab itu kritik dan saran sangat kami perlukan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja (LKJ) ini dapat melengkapi laporan pertanggung jawaban Pemerintah Kota Metro.

Metro, Januari 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

**JOSE SARMENTO P., S.STP., M.H.**

Pembina TK.I

NIP. 19780210 199810 1 002

41